

ANALISIS KEBIJAKAN ISRAEL MENOLAK OPERASIONAL *UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES* IN THE NEAR EAST (UNRWA) (2023-2024)

(Skripsi)

Oleh

**CHYTYA IKE RATU ARDILA
NPM 2156071023**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN ISRAEL MENOLAK OPERASIONAL UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST (UNRWA) (2023-2024)

Oleh
CHYTYA IKE RATU ARDILA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), sebuah lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina. Dalam konflik Israel-Palestina, UNRWA memainkan peran penting dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Namun, Israel menilai kehadiran UNRWA memperpanjang status pengungsi dan diduga memiliki kaitan dengan kelompok bersenjata seperti Hamas. Oleh karena itu, Israel mengambil serangkaian kebijakan penolakan terhadap UNRWA.

Dengan menggunakan level analisis politik domestik, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Israel terhadap UNRWA didorong oleh dominasi kelompok sayap kanan dalam pemerintahan koalisi yang memiliki ideologi nasionalis Yahudi kuat dan melihat UNRWA sebagai penghalang bagi agenda nasionalnya, terutama terkait isu pengungsi dan klaim teritorial.

Selain itu, narasi yang dibangun oleh elite politik, militer, dan media domestik yang menggambarkan UNRWA sebagai ancaman strategis juga memperkuat penolakan ini. Kebijakan ini merupakan cerminan dari kalkulasi politik internal Israel untuk mempertahankan hegemoni, memperkuat kontrol atas wilayah sengketa, dan menghilangkan simbol-simbol internasional yang dianggap menghambat proyek kolonisasi dan klaim teritorialnya.

Kata kunci: Israel, UNRWA, Palestina, Politik Domestik, Konflik Israel-Palestina, Marijke Breuning.

ABSTRACT

ANALYSIS OF ISRAEL'S POLICY OF REJECTING THE OPERATION OF THE UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST (UNRWA) (2023-2024)

By
CHYTYA IKE RATU ARDILA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), an agency under the auspices of the United Nations (UN) tasked with providing humanitarian assistance to Palestinian refugees. In the Israeli-Palestinian conflict, UNRWA plays an important role in providing education, health and social assistance services. However, Israel considers UNRWA's presence to prolong refugee status and is suspected of having links to armed groups such as Hamas. Therefore, Israel took a series of policies against UNRWA. Using the level of analysis of domestic politics, this study found that Israel's policy towards UNRWA is driven by the dominance of right-wing groups in the coalition government that have a strong Jewish nationalist ideology and see UNRWA as an obstacle to its national agenda, especially regarding refugee issues and territorial claims. In addition, the narrative constructed by the political elite, military, and domestic media that portrays UNRWA as a strategic threat also reinforces this rejection. This policy is a reflection of Israel's internal political calculations to maintain hegemony, strengthen control over disputed territories, and eliminate international symbols that are considered to hinder its colonization project and territorial claims.

Keywords: Israel, UNRWA, Palestine, Domestic Politics, Israeli-Palestinian Conflict, Marijke Breuning.

**ANALISIS KEBIJAKAN ISRAEL MENOLAK OPERASIONAL UNITED
NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES
IN THE NEAR EAST (UNRWA) (2023-2024)**

Oleh

CHYTYA IKE RATU ARDILA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN ISRAEL
MENOLAK OPERASIONAL UNITED
NATIONS RELIEF AND WORKS
AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES
IN THE NEAR EAST (UNRWA) (2023-
2024)**

Nama Mahasiswa : **Chytia Ike Ratu Ardila**

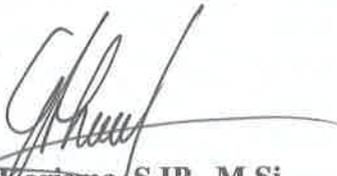
Nomor Pokok Mahasiswa : **2156071023**

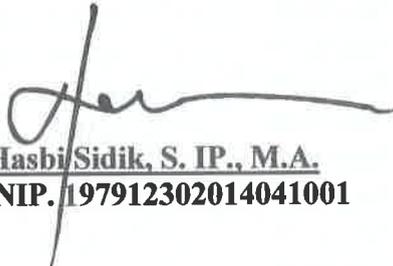
Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing


Gita Karisma, S.IP., M.Si.
NIP. 198701282014042001


Hasbi Sidik, S. IP., M.A.
NIP. 197912302014041001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA
NIP. 198106282005011003

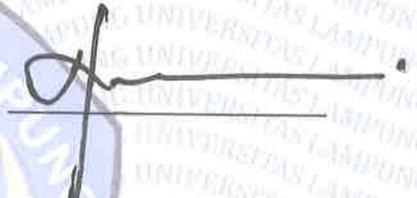
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

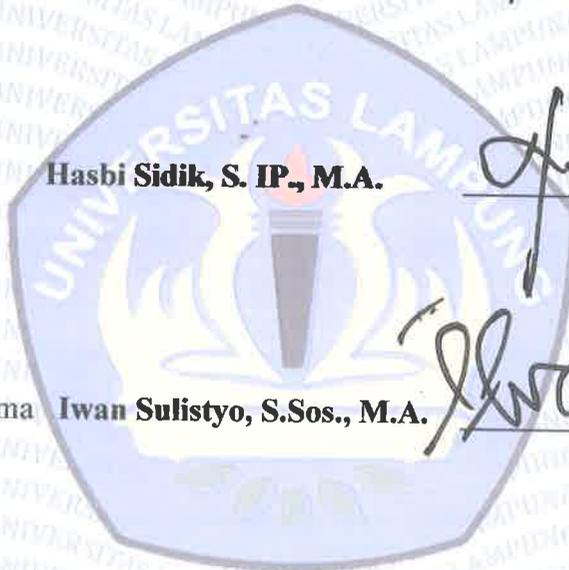
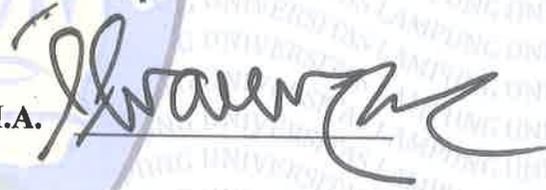
Ketua Gita Karisma, S.IP., M.Si.



Sekretaris Hasbi Sidik, S. IP., M.A.



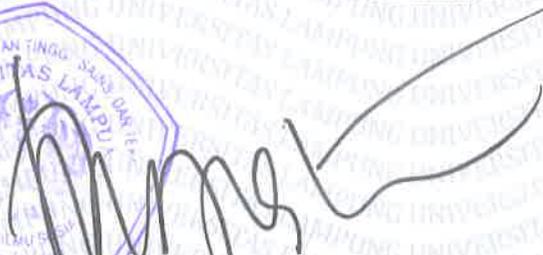
Penguji Utama Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M.Si.
NIP. 191608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Mei 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran, perumusan, dan penelitian saya sendiri, dengan pengecualian arahan dari pembimbing serta penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat hasil karya atau pendapat pihak lain yang telah dipublikasikan, kecuali jika secara jelas dicantumkan sebagai referensi dengan menyebutkan nama penulisnya dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan jika di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Chytya Ike Ratu Ardila
NPM. 2156071023

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Chytya Ike Ratu Ardila, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2002, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yuskam Rozi dan Ibu Suyeni. Penulis menempuh pendidikan formal di TK Karang Anyar, SDN 1 Karang Anyar, SMPN 1 Anak Ratu Aji, dan SMAN 1 Seputih Agung.

Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Sarjana (S-1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Wilayah Barat. Selama menjalani masa studi, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik serta berpartisipasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan oleh kampus. Melalui program tersebut, penulis memperoleh kesempatan untuk melaksanakan magang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung, yang memberikan pengalaman kerja nyata di lingkungan pemerintahan. Selain itu, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 di Desa Negara Harja, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

**"Sesungguhnya bersama kesulitan
ada kemudahan."**

(QS. Al-Insyirah: 6)

"I Can and I Will, Watch Me"

***"The courageous fallen, the anguished fallen, their lives have
meaning because we, the living refuse to forget them and as we ride
to certain death, we trust our successors to do the same for us!
Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the
cruelty of this world! MY SOLDIERS PUSH FORWARD! MY
SOLDIERS SCREAM OUT! MY SOLDIERS RAGE!."***

(Commander Erwin Smith)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan segala kerendahan hatiku

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

**Kedua orang tuaku tercinta,
Bapak Yuskam Rozi dan Ibu Suyeni**

Yang telah membesarkanku hingga hari ini, mencurahkan segala kasih sayang yang tiada henti, mengorbankan segala hal yang ada untuk masa depan ketiga anaknya.

Kedua saudara kandungku,

Kakak Galang dan Adik Cantika

Dan untuk Almamater tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Besar, atas setiap berkah, rahmat, dan karunia-Nya dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Kebijakan Israel Menolak Operasional *United Nations Relief And Works Agency For Palestine Refugees In The Near East* (UNRWA) (2023-2024)** dari awal hingga selesai. Skripsi ini berguna sebagai pemenuhan syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang telah membantu memberikan masukan, saran, doa, dan semangat kepada penulis, yaitu:

1. Allah SWT. yang telah memberikan ridho dan nikmat-Nya: kesehatan, kesempatan, kelancaran, serta kebahagiaan dalam proses ini.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, S. Sos., M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N.,MPA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung.
4. Mbak Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama untuk segala bimbingan, arahan, kritik, maupun saran, waktu, tenaga dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bang Hasbi Sidik, S. IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping untuk segala bimbingan, arahan, kritik maupun saran, waktu, tenaga dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Mas Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A., selaku dosen pembahas atas kritikan maupun saran, waktu, tenaga yang telah diberikan terhadap skripsi ini.

7. Jajaran Dosen FISIP universitas Lampung, khususnya Jurusan Hubungan Internasional, yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh Staf dan Karyawan FISIP Universitas Lampung, khususnya Staf Jurusan Hubungan Internasional.
9. Papaku tersayang, Bapak Aipda Yuskam Rozi, terima kasih telah menjadi sosok lelaki pertama yang mengajarkan arti cinta tanpa syarat, ketulusan tanpa pamrih, dan pengorbanan yang tak pernah meminta balasan. Dalam diam dan teguhmu, penulis belajar tentang arti tanggung jawab dan keberanian. Setiap langkah penulis hari ini tak lepas dari doa dan perjuanganmu yang tak pernah terlihat di permukaan, namun selalu terasa di hati.
10. Mamaku tercinta, Ibu Suyeni, sebuah karunia terbesar dalam hidup penulis adalah dilahirkan dari rahim wanita sekuat dan setangguh dirimu. Dalam setiap peluh dan air matamu, tersimpan cinta yang tak pernah habis, keteguhan yang tak pernah goyah, dan doa yang tak pernah putus. Terima kasih atas kasih sayangmu yang tak ternilai, semoga Allah membalas setiap pengorbananmu dengan limpahan kebahagiaan dan keberkahan di dunia dan akhirat.
11. Saudara kandung penulis, Galang Pratu Kelana, S.Pd., terima kasih atas segala dukungan, nasihat, dan semangat yang selalu kau berikan.
12. Saudari kandung penulis, Chantika Ratu Ramadan, Terima kasih atas dukungan yang tak pernah padam, yang selalu memberiku kekuatan untuk terus maju.
13. Sahabatku, Rahmalia Intana (2156071008), mungkin kita tidak terikat oleh darah, namun kehadiranmu dalam hidup penulis telah menjadi bagian dari keluarga yang tak ternilai harganya. Terima kasih atas semua kebaikan yang kau limpahkan, bahkan ketika penulis sendiri sedang kehilangan arah.
14. Sahabatku, Okva Hikmah Kesumasari, terima kasih telah membersamai dan mewarnai hidup penulis sejak masa SMP, masa yang penuh cerita, pencarian jati diri, dan tumbuh bersama. Terima kasih atas segala

nasihat dan dukungan yang telah kau berikan.

15. Sahabatku, Riza Amanda, S.H., terima kasih telah kebersamaian dan mewarnai sejak masa SMA penulis dengan tawa, cerita, dan kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih atas segala nasihat yang telah kau berikan, yang mendorong penulis untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
16. Sahabat-sahabat penulis, Putri S Nababan, Rafi Putra, Reyhan Araf, Fiqri Qurrahman, Revaldo Alwi, terima kasih telah menjadi teman perjalanan penulis selama masa kuliah menjadi tempat berbagi canda dan tawa, atas segala bantuan, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan.
17. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2021, terima kasih atas segala cerita dan pelajaran hidup yang penulis rasakan selama masa perkuliahan ini.
18. Teman-teman KKN Negara Harja periode 1 tahun 2024, Meza, Adelia, Nabila, Wafiq, Bang Jogi, Ribon, terima kasih atas segala kenangan indah yang penulis belum pernah rasakan sebelumnya selama 40 hari lamanya.
19. Nama-nama yang tidak dapat penulis sebutkan, terima kasih telah hadir di kehidupan penulis entah itu sebagai kenangan atau pembelajaran.
20. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for... for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Bandar Lampung, Juni 2025

Chytya Ike Ratu Ardila

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Konseptual	13
2.3 Kerangka Pemikiran.....	16
III. METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Fokus Penelitian.....	18
3.3 Sumber Data.....	18
3.4 Teknik Pengumpulan Data	19
3.5 Teknik Analisis Data.....	19
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Kebijakan PBB dan UNRWA terhadap pengungsi Palestina.....	21
4.2 Analisis alasan Israel membuat Kebijakan menolak Operasional UNRWA.....	35
V. KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	12
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 2. Program-program UNRWA.....	25
Gambar 3. sidang pleno Knesset.....	36
Gambar 4. Warga Yahudi Israel di depan markas UNRWA Yerusalem.....	39
Gambar 5 Struktur pemerintahan Israel	40
Gambar 6. Partai anggota Knesset.....	46
Gambar 7. Unggahan IDF di platform X.....	51
Gambar 8. Unggahan IDF di platform Instagram.....	52

DAFTAR SINGKATAN

AIPAC	: American Israel Public Affairs Committee
AS	: Amerika Serikat
CNN	: Cable News Network
ESF	: Education Strategic Framework
Hamas	: Harakat al-Muqawama al-Islamiyya
IDF	: Israel Defense Force
LoA	: Level of Analysis
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLO	: Palestine Liberation Organization
SOP	: Standard Operating Procedure
SSNP	: Social Safety Net Program
UN	: United Nations
UNCCP	: United Nations Conciliation Commission for Palestine
UNRPR	: United Nations Relief for Palestine Refugees
UNRWA	: United Nation Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East
USAID	: United States Agency for International Development
WHO	: World Health Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk perselisihan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer antara dua pihak atau lebih, baik dalam skala domestik maupun internasional (Sitompul, 2014). Konflik semacam ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor seperti perebutan wilayah, perbedaan ideologi, kepentingan politik, atau ketidaksetaraan ekonomi (Leader Maynard, 2019). Dalam banyak kasus, konflik bersenjata tidak hanya menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap stabilitas regional, hubungan diplomatik, dan kesejahteraan masyarakat sipil (Sitompul, 2014). Selain itu, konflik bersenjata sering kali melibatkan aktor non-negara dan memperumit upaya penyelesaian karena adanya dimensi politik, etnis, dan agama yang saling terkait.

Salah satu konflik bersejata yang masih terjadi sampai saat ini adalah konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Bermula dari Israel yang secara resmi berdiri pada 24 Mei 1948, hal ini terjadi setelah berakhirnya Mandat Britania atas Palestina yang sebelumnya dibawah kepemimpinan Inggris sejak 1920 (Benny, 2009). Berdasarkan pada resolusi PBB, yang dikenal dengan resolusi 181, deklarasi ini mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara (satu untuk orang yahudi dan satu untuk orang Arab), dengan Yerussalem sebagai wilayah internasional (Benny, 2009). Namun, keputusan ini memicu ketegangan politik dan konflik berkepanjangan antara masyarakat Yahudi dan Arab, yang menolak hasil pembagian tersebut.

Hingga saat ini, isu pembagian wilayah Palestina masih menjadi salah satu sumber utama konflik, memengaruhi stabilitas regional dan hubungan internasional di Timur Tengah. Konflik ini mengakibatkan krisis kemanusiaan menciptakan

salah satu gelombang pengungsian terbesar dalam sejarah modern, yaitu lebih dari 700.000 orang Palestina menjadi pengungsi tanpa akses kebutuhan dasar, tempat tinggal serta perlindungan hukum (Kuhparuw et al., 2024).

Dalam menanggapi dampak krisis kemanusiaan yang serius ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendirikan *United Nation Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) atau Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat pada tahun 1949 (UNRWA, 2023). Badan ini diberi mandat khusus untuk memberikan bantuan darurat dan dalam jangka panjang kepada pengungsi Palestina di Gaza, Yordania, Lebanon, Tepi Barat dan Suriah. (UNRWA, 2023).

UNRWA tidak hanya memberi bantuan darurat seperti makanan, tempat tinggal atau layanan kesehatan, tetapi juga berperan penting dalam menyediakan pendidikan bagi lebih dari 5,9 juta pengungsi Palestina (UNRWA, 2023). Selain itu, UNRWA juga berfungsi untuk melindungi identitas dan hak-hak pengungsi Palestina, termasuk hak untuk kembali ke tanah air mereka sesuai dengan resolusi majelis umum PBB Nomor 194 (Sulaiman, 2022). Namun, peran ini sering memicu kontroversi, terutama dari pihak-pihak yang menganggap keberadaan UNRWA sebagai penghalang bagi penyelesaian konflik jangka panjang (Sulaiman, 2022).

Umumnya, lembaga kemanusiaan seperti UNRWA di terima dan di dukung karena berperan dalam memberi bantuan kepada pengungsi yang terdampak konflik. Namun, sikap Israel yang menolak keberadaan UNRWA menunjukkan adanya kompleksitas politik yang lebih rumit dalam konflik Israel-Palestina. Menurut Israel, badan ini tidak hanya memperpanjang status pengungsi Palestina tetapi juga berkontribusi pada eskalasi konflik (Bajaj et al., 2024). Israel juga menuduh bahwa ada kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah UNRWA memberikan sentimen anti-Israel dan terorisme (Bajaj et al., 2024).

Pada tahun 2023, situasi di Palestina kembali memanas. Ketegangan ini dipicu oleh serangan yang dilancarkan Hamas sebagai respons terhadap tindakan represif dan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Serangan tersebut terjadi pada Sabtu, 7 Oktober 2023, dari Jalur Gaza menuju wilayah yang diduduki Israel (Hamdan, 2024). Hamas, singkatan dari Harakat al-Muqawama al-Islamiya atau "Gerakan Perlawanan Islam", didirikan oleh Sheikh Ahmed Yassin, seorang ulama

dan aktivis Palestina (Hamdan, 2024). Sejak akhir 1960-an, Yassin mulai berdakwah dan menjalankan kegiatan sosial di Tepi Barat dan Jalur Gaza dua wilayah yang diduduki Israel usai “Perang Enam Hari” (Hamdan, 2024).

Hamas merupakan salah satu faksi militan Islam dari dua partai politik utama di Palestina, dan saat ini menguasai Jalur Gaza yang dihuni oleh lebih dari dua juta warga Palestina (Hamdan, 2024). Organisasi ini dikenal luas karena aksi perlawanan bersenjata terhadap Israel (Hamdan, 2024). Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Namun, sebagian negara hanya menetapkan sayap militer Hamas, yaitu Brigade Izzuddin al-Qassam, dalam kategori tersebut. Sebagai tanggapan atas serangan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu segera menyatakan keadaan perang (Hamdan, 2024).

Sejak saat itu, konflik mengalami eskalasi, tidak hanya dalam bentuk serangan militer terhadap kelompok bersenjata, tetapi juga berdampak pada lembaga-lembaga kemanusiaan. Salah satu target yang terdampak adalah UNRWA, badan PBB yang bertugas memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina. Serangan Israel terhadap UNRWA berlangsung secara fisik, dengan menghancurkan sejumlah fasilitas penting yang dikelola lembaga tersebut di Jalur Gaza, melarang masuknya bantuan, dan menyebabkan kematian 160 karyawan badan tersebut, selain para pengungsi yang berlindung di tempat penampungan dan sekolah (Hamdan, 2024). Saat ini, sekitar 1,9 juta pengungsi mencari perlindungan di atau dekat 154 tempat penampungan UNRWA, sementara 155 fasilitasnya mengalami kerusakan (Hamdan, 2024).

Pada Januari 2024, Israel mengajukan tuduhan serius terhadap UNRWA, dengan menyatakan bahwa 12 staf dari badan tersebut terlibat dalam serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 (Azzahra, 2024). Kemudian pada Maret 2024, Israel meningkatkan tuduhannya dengan menyebut bahwa lebih dari 450 staf UNRWA merupakan anggota militer dalam kelompok-kelompok teroris di Gaza (Azzahra, 2024). UNRWA, yang mempekerjakan sekitar 32.000 orang di seluruh wilayah operasinya, memiliki 13.000 staf yang bertugas di Jalur Gaza (Azzahra, 2024).

Pada November 2024, Israel secara resmi melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya yaitu Yerusalem Timur, dengan klaim bahwa organisasi tersebut telah disusupi oleh kelompok militan, termasuk Hamas (CNN, 2024a). Langkah ini diambil setelah Knesset (Parlemen Israel) mengesahkan undang-undang yang menyatakan UNRWA sebagai organisasi teroris (CNN, 2024a). Sidang pleno Knesset pada Senin malam menyetujui undang-undang untuk memutuskan hubungan resmi dengan dan menghentikan aktivitas UNRWA dalam pembacaan kedua dan ketiga (CNN, 2024a).

Undang-undang yang diresmikan tersebut menyatakan bahwa “UNRWA tidak akan mengelola institusi, memberikan layanan, atau melakukan kegiatan apapun di wilayah kedaulatan Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung” (CNN, 2024a). Atas arahan Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, Kementerian Luar Negeri Israel memberitahukan kepada PBB mengenai pembatalan perjanjian antara Israel dan UNRWA, demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Israel (Berman, 2024). Dalam pernyataan tersebut, Kementerian Luar Negeri Israel mengungkapkan bahwa mereka membatalkan perjanjian yang disepakati pada tahun 1967, yang sebelumnya akan memfasilitasi UNRWA untuk beroperasi di Israel (Berman, 2024).

Keberanian Israel untuk menolak operasi UNRWA dan secara tidak langsung menentang PBB tidak muncul tanpa alasan. Sikap ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, Israel melihat UNRWA sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara. UNRWA mendukung hak kembali bagi pengungsi Palestina, Israel khawatir bahwa kembalinya pengungsi dalam jumlah besar akan mengubah komposisi demografis negaranya, yang selama ini mayoritas penduduknya adalah Yahudi (Patnistik, 2024). Israel juga menuduh UNRWA memiliki hubungan dengan kelompok militan seperti Hamas di Gaza, memperkuat persepsi bahwa lembaga ini bukan hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga memperkuat pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh Israel (Patnistik, 2024).

Dari faktor eksternal, dukungan kuat dari Amerika Serikat menjadi salah satu alasan utama Israel berani menentang PBB. AS secara konsisten memberikan bantuan militer dan diplomatik kepada Israel, termasuk menggunakan hak veto di

Dewan Keamanan PBB untuk memblokir resolusi yang mengkritik Israel (Fitri & Fadlia, 2019). Dukungan ini memberikan jaminan perlindungan diplomatik yang membuat Israel merasa aman untuk mengambil langkah kontroversial tanpa khawatir menghadapi sanksi besar (Fitri & Fadlia, 2019).

Selain itu, Israel memiliki kekuatan militer yang sangat maju, termasuk sistem pertahanan seperti *Iron Dome* dan kekuatan nuklir yang tidak dinyatakan secara resmi (Patnistik, 2024). Keunggulan ini membuat Israel percaya diri untuk menolak tekanan internasional karena ancaman militer dari luar dianggap tidak efektif (Simangunsong, 2024). Tekanan dari komunitas internasional pun sering kali tidak efektif karena tidak ada sanksi tegas yang diberlakukan, dan banyak negara, termasuk beberapa negara Eropa dan Arab, tetap menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel (Simangunsong, 2024).

Israel menilai bahwa keberadaan UNRWA justru memperpanjang krisis pengungsi Palestina (Sulaiman, 2022). Salah satu alasan utamanya adalah karena UNRWA memberikan status pengungsi kepada generasi keturunan dari para pengungsi asli yang terusir akibat konflik Israel-Palestina pada tahun 1948 (Sulaiman, 2022). Dalam pandangan Israel, langkah ini bukan hanya mempertahankan masalah, tetapi juga memperkuat narasi hak kembali (*right of return*) bagi jutaan warga Palestina yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah (Mudore, 2024). Bagi Israel, hak kembali ini dianggap sebagai ancaman demografis dan eksistensial terhadap karakter negara sebagai negara bangsa Yahudi (Mudore, 2024).

Upaya ini bukan hanya dilakukan melalui pernyataan resmi atau diplomasi formal, tetapi juga melalui pengaruh terhadap lembaga-lembaga internasional, hubungan media global, serta aliansi strategis dengan negara-negara besar (Mudore, 2024). Dalam jangka panjang, tujuan Israel adalah membentuk persepsi baru bahwa setiap tindakan Israel di wilayah konflik merupakan bentuk legitimasi pembelaan diri, bukan pelanggaran hukum internasional (Primayanti, 2024). Dengan mengarahkan narasi seperti itu, Israel berharap dapat mengurangi tekanan politik dan moral dari komunitas internasional, serta memperkuat dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalkannya, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan stabilitas regional (Primayanti, 2024).

Israel memandang UNRWA bukan semata-mata sebagai lembaga kemanusiaan, tetapi sebagai entitas yang memperkuat legitimasi dan perjuangan politik Palestina di tingkat global (CNN, 2024a). Oleh karena itu, seluruh kebijakan yang diambil Israel terhadap UNRWA dapat dipahami sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga kedaulatan, stabilitas internal, identitas nasional, dan keamanan negaranya (Primayanti, 2024). Dalam hal ini, kepentingan nasional menjadi landasan utama dalam setiap tindakan Israel terhadap keberadaan dan operasi UNRWA di wilayahnya.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai munculnya keputusan penolakan operasional UNRWA oleh Israel. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan adanya pengaruh pada bantuan kemanusiaan, stabilitas regional, serta perdamaian yang berkelanjutan. Relevansi dari studi ini juga dapat dilihat dalam konteks tantangan terhadap meningkatnya peran organisasi internasional. Dengan memanfaatkan data-data yang relevan, penelitian ini akan menganalisis proses pembuatan kebijakan, terutama dalam konteks pengaruh struktur birokrasi pemerintahan Israel. Fokus utama penelitian akan diarahkan pada peran kelompok kepentingan, media dan opini publik.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam konflik Israel-Palestina, *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan layanan dasar bagi pengungsi Palestina. Namun, Israel telah mengambil kebijakan untuk menolak operasional UNRWA di wilayahnya. Kebijakan ini memunculkan berbagai konsekuensi, baik bagi pengungsi Palestina maupun perkembangan politik di kawasan. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, **“Apa alasan Israel membuat kebijakan menolak operasional UNRWA?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1 Mendeskripsikan kebijakan PBB dan UNRWA terhadap pengungsi Palestina.
- 1.3.2 Mendeskripsikan alasan Israel dalam membuat kebijakan menolak operasional UNRWA.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hubungan internasional, mengenai konflik Israel-Palestina dengan fokus pada analisis kebijakan Israel terhadap UNRWA. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut isu-isu terkait hukum internasional dan konflik kemanusiaan.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai penguat isu dan referensi dari topik yang dibahas.

Ekin Deniz Uzun (2024) yang berjudul "*Pengungsi Palestina di Gaza: UNRWA dan Sekitarnya*" menyoroti bagaimana konflik yang meningkat sejak Oktober 2023 memunculkan tantangan besar bagi UNRWA dalam melaksanakan misinya. Mengeksplorasi kemungkinan perlindungan alternatif di luar UNRWA, dengan analisis yang didasarkan pada pendapat Advokat Jenderal Nicholas Emiliou dalam kasus Pengadilan Uni Eropa C-563/22. Pengeboman yang terus berlanjut dan blokade total yang diberlakukan oleh Israel memperburuk kondisi hidup di Gaza, membuat akses terhadap bantuan dan perlindungan UNRWA menjadi semakin sulit (Uzun, 2024). Pendapat Advokat Jenderal Emiliou yang menyatakan bahwa pengungsi Palestina dapat berargumen bahwa perlindungan UNRWA telah berakhir karena kondisi kehidupan yang tidak manusiawi di Gaza (Uzun, 2024). Dengan mengakui keterbatasan UNRWA dalam situasi yang semakin memburuk di Gaza, komunitas internasional perlu mempertimbangkan mekanisme perlindungan alternatif untuk memastikan hak-hak pengungsi terlindungi (Uzun, 2024).

Ihsan Yilmaz dan Nicholas Morieson (2022), Dalam penelitiannya yang berjudul "*Nasionalism, Religion, and Archaeologi: The Civilizational Populism of Benjamin Netanyahu and Likud*" membahas mengenai Netanyahu yang menggunakan kombinasi populisme dan civilizationism untuk memperkuat kekuasaannya dan membentuk kebijakan luar negeri Israel. Menggambarkan Israel sebagai negara yang beradab dan demokratis, sementara negara-negara Arab serta kelompok seperti Hamas dianggap sebagai ancaman yang tidak beradab (Yilmaz et

al., 2022). Strategi ini membantu Netanyahu mendapatkan dukungan dari rakyat Israel dan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Dengan menampilkan Israel sebagai pelindung nilai-nilai Barat, ia berhasil memperkuat hubungan diplomatik dan mendapatkan bantuan internasional (Yilmaz et al., 2022). Namun, strategi ini juga digunakan untuk membenarkan tindakan keras terhadap Palestina, termasuk pembangunan pemukiman ilegal dan operasi militer. Netanyahu berargumen bahwa tindakan ini diperlukan untuk melindungi Israel dari ancaman eksternal (Yilmaz et al., 2022). Wacana seperti ini membuat hubungan Israel dengan Palestina semakin tegang. Netanyahu membagi dunia menjadi "kita" (Israel dan Barat yang beradab) dan "mereka" (Palestina dan dunia Arab yang dianggap sebagai ancaman) (Yilmaz et al., 2022). Hal ini membuat solusi damai semakin sulit karena kebijakan Israel didasarkan pada ketakutan dan justifikasi tindakan agresif terhadap Palestina. Strategi ini mungkin menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat memperburuk konflik dan membuat solusi damai semakin sulit dicapai (Yilmaz et al., 2022).

Jhoan Titto (2023), dalam penelitiannya yang berjudul "*Neoliberalisme memandang UNRWA dalam konflik Palestina-Israel*" melihat dari sudut pandang Neoliberalisme, kerjasama internasional melalui organisasi seperti UNRWA menjadi sangat penting. Meskipun sistem internasional bersifat anarkis, organisasi internasional dapat menciptakan mekanisme yang memungkinkan aktor-aktor global, baik negara maupun non-negara, untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan bersama (Titto, 2023). Namun, penelitian ini juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi UNRWA, termasuk pendanaan yang terbatas dan kritik terhadap keberlanjutan program-programnya. Dalam konteks ini, penelitian ini menegaskan bahwa UNRWA adalah wujud nyata dari relevansi Neoliberalisme dalam hubungan internasional modern (Titto, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Neoliberalisme yang menyatakan bahwa kerja sama dapat tercapai melalui institusi internasional untuk mengurangi ketidakpastian dan mendorong stabilitas (Titto, 2023).

Ayat Hamdan (2024), dalam penelitiannya berjudul "*Perang Israel Melawan UNRWA dan Dampaknya terhadap Pengungsi Palestina*" berfokus pada sekritisasi UNRWA oleh Israel dan bagaimana hal ini mempengaruhi operasi dan

mandat badan tersebut serta pengungsi Palestina. Sekuritisasi UNRWA oleh Israel adalah proses di mana Israel memosisikan badan ini sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasionalnya (Hamdan, 2024). Proses ini melibatkan retorika yang menyamakan UNRWA dengan organisasi teroris, dengan tujuan untuk melegitimasi tindakan-tindakan politik luar biasa, seperti penghancuran fasilitas UNRWA, pembunuhan staf, dan pemblokiran bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina (Hamdan, 2024). Israel berusaha membubarkan UNRWA dan memindahkan tanggung jawab kemanusiaan kepada badan-badan lain yang lebih mudah dikendalikan, seperti Program Pangan Dunia atau USAID (Hamdan, 2024). Upaya ini bertujuan untuk menghapus status pengungsi Palestina dan mencegah mereka dari mengklaim hak mereka untuk kembali ke tanah asal mereka, yang telah lama menjadi bagian integral dari perjuangan Palestina (Hamdan, 2024). Oleh karena itu, komunitas internasional harus menolak upaya sekuritisasi dan mendukung UNRWA untuk melanjutkan misinya dalam membantu pengungsi Palestina (Hamdan, 2024).

Monisha Bajaj, Jazzmin C. Gota, dan David A. Tow (2024), dalam peelitiannya yang berjudul "*UNRWA dan Pendidikan Pengungsi Palestina : wawancara dengan Anne Irfann*" melalui wawancara dengan Anne Irfan, berfokus pada sejarah UNRWA, program-program pendidikan yang diselenggarakan, serta tekanan politis yang dihadapi oleh badan ini dalam konteks konflik Israel-Palestina. Program pendidikan UNRWA tidak hanya meliputi mata pelajaran akademik standar tetapi juga pendidikan hak asasi manusia, yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kesadaran hak-hak sipil di kalangan siswa. Namun, tantangan yang dihadapi UNRWA sangat rumit. Salah satu tantangan terbesar adalah sekuritisasi pendidikan oleh Israel, yang menuduh kurikulum UNRWA mengandung unsur-unsur yang mempromosikan kekerasan dan antisemitisme (Bajaj et al., 2024). Tuduhan ini, sering kali tidak berdasar dan lebih banyak berakar pada politik daripada fakta (Bajaj et al., 2024). Ke depan, masa depan UNRWA penuh dengan ketidakpastian, terutama karena ketergantungan pada pendanaan donor internasional yang sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik global (Bajaj et al., 2024).

Eka Risyia Fitri & Faradilla Fadlia (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Lobi Israel Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pada Konflik Israel Dan Palestina*” menyoroti bagaimana lobi Israel, khususnya melalui organisasi *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC), memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik ini. Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017 (Fitri & Fadlia, 2019). Keputusan Trump tersebut bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari pengaruh kuat lobi Israel di berbagai tingkat pemerintahan AS, baik eksekutif maupun legislatif (Fitri & Fadlia, 2019). AIPAC, sebagai kelompok terbesar dan paling berpengaruh, memiliki jaringan yang luas di kalangan pengusaha, politisi, dan pembuat kebijakan di Amerika Serikat. Kelompok ini menggunakan kekuatan politik dan finansialnya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri AS yang terkait dengan Israel sejalan dengan kepentingan Israel (Fitri & Fadlia, 2019). Pengaruh ini terlihat jelas dalam keputusan Trump yang tidak hanya memicu ketegangan di Timur Tengah tetapi juga mengganggu proses perdamaian yang selama ini diupayakan oleh berbagai pihak internasional (Fitri & Fadlia, 2019).

Tabel 1. Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu pada penelitian Analisis kebijakan Israel menolak operasional UNRWA

Aspek Komparasi	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	Penelitian 5	Penelitian 6
Penulis	Ekin Deniz Uzun (2024)	Ihsan Yilmaz dan Nicholas Morieson (2022)	Jhoan Titto (2023)	Ayat Hamdan (2024)	Monisha Bajaj, Jazzmin C. Gota, dan David A. Tow (2024)	Eka Risya Fitri & Faradilla Fadlia (2019)
Topik Penelitian	Pengungsi Palestina di Gaza: UNRWA dan Sekitarnya	<i>Populism and Politics in Israel: The Role of Civilizationism in Netanyahu's Discourse</i>	Neoliberalisme memandang UNRWA dalam konflik Palestina-Israel	Perang Israel Melawan UNRWA dan Dampaknya terhadap Pengungsi Palestina	UNRWA dan Pendidikan Pengungsi Palestina : wawancara dengan Anne Irfann	Analisis Lobi Israel Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pada Konflik Israel dan Palestina
Metode	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif dengan Teori Neoliberalisme	Kualitatif	Kualitatif Berbasis Wawancara.	Kualitatif
Fokus Penelitian	Mengkaji kemungkinan pengungsi Palestina mencari perlindungan di negara lain selain dari UNRWA.	Menganalisis bagaimana Netanyahu menggunakan konsep civilizationism untuk membenarkan kebijakan domestik dan luar negerinya.	Menganalisis pandangan Neoliberalisme tentang pentingnya kerjasama internasional melalui organisasi internasional dalam mengatasi konflik Israel-Palestina.	Meneliti dampak sekuritisasi UNRWA terhadap operasional dan mandat UNRWA dalam menyediakan bantuan kepada pengungsi Palestina.	Implementasi pendidikan hak asasi manusia di sekolah-sekolah UNRWA dan Tantangan di masa depan UNRWA di tengah konflik Israel-Palestina.	Menganalisis bagaimana kelompok lobi Israel, terutama AIPAC (<i>American Israel Public Affairs Committee</i>), memengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap konflik Israel-Palestina.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Menurut Joshua Goldstein, pengertian dari kebijakan luar negeri adalah strategi-strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan sikap mereka di dunia internasional (Falkowski, 1979). Kebijakan luar negeri merupakan sikap suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain dan aktor-aktor internasional lainnya, kebijakan ini dapat berbentuk diplomasi, perjanjian, aliansi hingga intervensi militer (Falkowski, 1979). Secara umum kebijakan luar negeri yang dibentuk suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional (Rachmaniyah et al., 2014).

Dalam pandangan realisme politik yang dikembangkan Morgenthau, kepentingan nasional menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan luar negeri, dan kekuasaan merupakan alat untuk mencapai serta mempertahankan kepentingan tersebut (Morgenthau, 1948). Kebijakan luar negeri merujuk pada berbagai tindakan yang diambil oleh suatu pemerintah dalam hubungannya dengan negara lain dalam lingkaran politik internasional (Rachmaniyah et al., 2014). Tindakan ini didasarkan pada sejumlah asumsi dan tujuan tertentu yang bertujuan untuk menjaga keamanan nasional.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan luar negeri terdiri dari beberapa komponen utama, seperti pandangan, sikap terhadap dunia luar dan keputusan yang diambil (Rachmaniyah et al., 2014). Tindakan dalam kebijakan luar negeri mencerminkan kapasitas atau kekuatan (*power*) suatu negara, di mana keberhasilan penerapannya bergantung pada tingkat kekuatan yang dimiliki (Holsti, 1977). Dalam konteks hubungan internasional, kebijakan luar negeri diwujudkan dalam bentuk komunikasi atau sinyal politik yang bertujuan untuk memengaruhi atau mempertahankan perilaku negara lain guna mencapai tujuan tertentu (Robert, 1970).

Setiap negara memiliki tujuan kebijakan luar negeri yang berbeda-beda. Namun, kebijakan tersebut dirancang untuk memenuhi serta mencapai kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri diterapkan untuk memengaruhi negara lain, menjaga stabilitas dan keamanan nasional, meningkatkan reputasi di tingkat internasional, serta memperoleh keuntungan strategis (Rachmaniyah et al., 2014).

Dalam perumusannya, negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor internal (sistem politik, kondisi ekonomi, dan opini publik) serta faktor eksternal, (tekanan dari negara lain, peran organisasi internasional, dan dinamika global) (Rachmaniyah et al., 2014).

William de Coplin menyatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara, dengan tetap mempertimbangkan norma-norma internasional (Coplin, 1971). Selain itu, berbagai faktor yang memengaruhi serta dipengaruhi oleh kebijakan ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut mencakup politik domestik, pengambil keputusan, kapabilitas ekonomi dan militer, serta tindakan dalam politik luar negeri (Rachmaniyah et al., 2014).

2.2.2 Level Analisis Politik Domestik

Level of Analysis (LoA) politik domestik dianggap sebagai aspek penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri, karena merupakan bagian integral dari implementasi kebijakan luar negeri itu sendiri (Dharmaputra & Pabyantara, 2008). Pendekatan ini berfungsi sebagai alat analisis yang didasarkan pada karakteristik internal suatu negara, dengan menyoroti keterkaitan antara proses perumusan dan pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri dan politik domestik (Dharmaputra & Pabyantara, 2008).

Pemerintahan suatu negara tidak beroperasi secara tunggal, melainkan melibatkan berbagai aktor representatif yang saling berinteraksi. Interaksi antarpelaku inilah yang membentuk dalam politik domestik (Fearon, 1998). Politik domestik mencakup seluruh aktivitas politik yang berlangsung di dalam negeri, termasuk struktur kekuasaan politik, keberadaan partai politik, serta hubungan antara koalisi dan oposisi dalam pemerintahan (Fearon, 1998). Politik domestik ini dapat mendorong suatu negara untuk menyesuaikan arah kebijakan luar negerinya agar selaras dengan kepentingan dalam negerinya (Fearon, 1998).

Aktor yang memiliki pengaruh dalam politik domestik, yang mencakup aktor-aktor seperti kelompok eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pemerintahan, partai politik, kelompok bisnis, kelompok kepentingan, media, berbagai kelompok

masyarakat, individu-individu penting, serta kelompok-kelompok kriminal di dalam negeri (Hudson, 2007). Sementara itu, berfokus pada konstituen domestik dalam politik luar negeri dan menyoroti bahwa kelompok kepentingan, media, dan opini publik merupakan aktor-aktor dengan berpengaruh (Breuning, 2007).

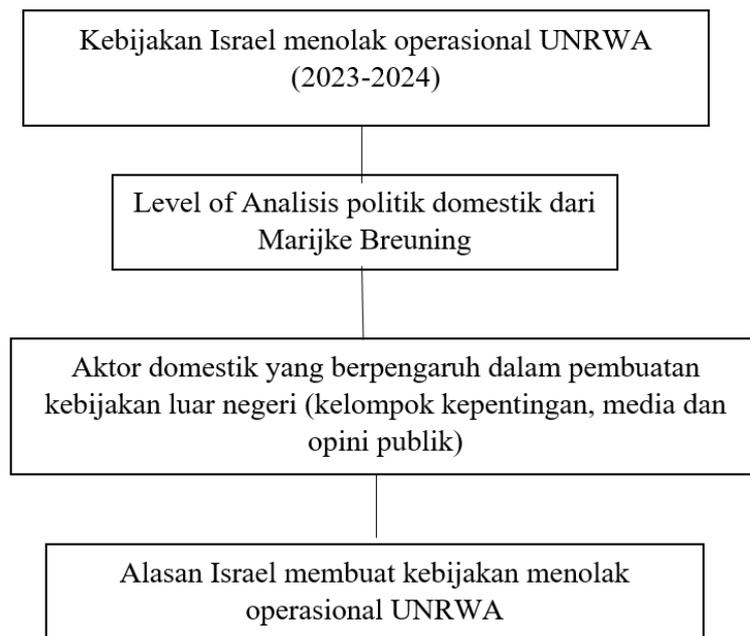
Kelompok kepentingan (*interest groups*) merupakan organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan tertentu dalam masyarakat (Breuning, 2007). Dalam konteks kebijakan luar negeri, kelompok-kelompok ini dapat berupa perusahaan multinasional, asosiasi industri, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok etnis, hingga komunitas keagamaan. Kelompok kepentingan berusaha memengaruhi kebijakan luar negeri melalui lobi, kampanye politik, atau bahkan tekanan ekonomi terhadap pembuat kebijakan. Kelompok kepentingan berperan aktif dalam mengarahkan perhatian pemerintah pada isu-isu yang mungkin luput dari radar publik umum (Breuning, 2007).

Media berfungsi sebagai perantara utama antara dunia internasional dan masyarakat domestik (Breuning, 2007). Melalui pemberitaan, media menyampaikan informasi terkait konflik, kerja sama, atau dinamika global yang terjadi. Namun, media tidak hanya menyampaikan fakta, melainkan juga membingkai (*framing*) informasi dalam perspektif tertentu. Framing ini berpengaruh langsung terhadap bagaimana isu luar negeri dipersepsikan oleh publik dan elite politik. Media dapat meningkatkan visibilitas isu internasional tertentu sehingga mendorong respon kebijakan luar negeri (Breuning, 2007).

Opini publik mencerminkan pandangan mayoritas warga negara terhadap isu tertentu, termasuk isu internasional (Breuning, 2007). Di negara demokrasi, opini publik menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam penyusunan kebijakan luar negeri. Pejabat pemerintah, terutama yang dipilih melalui pemilu, cenderung memperhatikan sentimen masyarakat untuk menjaga dukungan elektoral. Opini publik dapat bertindak sebagai pembatas (*restraint*) terhadap tindakan pemerintah yang dianggap tidak populer, seperti intervensi militer atau kebijakan imigrasi yang ketat (Breuning, 2007).

2.3 Kerangka Pemikiran

Konflik antara Israel dan Palestina telah menyebabkan salah satu gelombang pengungsian terbesar dalam sejarah modern. Untuk merespons krisis kemanusiaan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) pada tahun 1949, dengan mandat memberikan bantuan darurat dan jangka panjang kepada pengungsi Palestina. Namun, Israel menuduh bahwa UNRWA memperpanjang status pengungsi Palestina dan berkontribusi pada eskalasi konflik. Sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel terhadap fasilitas UNRWA telah menghancurkan infrastruktur penting, menewaskan 160 karyawan UNRWA dan banyak pengungsi. Pada November 2024, Israel melarang UNRWA beroperasi, mengklaim bahwa organisasi tersebut telah disusupi oleh kelompok militan. Penelitian ini menggunakan level analisis politik domestik sebagai kerangka analisis untuk mengeksplorasi isu yang dikaji.



Gambar 1. Diagram Kerangka Pemikiran dalam penelitian Analisis Kebijakan Israel Menolak Operasional UNRWA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian dalam kategori penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menyelidiki suatu peristiwa atau fenomena dalam kehidupan individu atau kelompok dengan meminta mereka menceritakan pengalaman yang dialami. Peneliti kemudian menyusun informasi yang diperoleh dalam bentuk kronologi deskriptif (Khoiron, 2019). Ciri khas dari penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, atau narasi, bukan angka sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).

Secara umum, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan suatu keadaan, seperti situasi, kondisi, hubungan yang terjadi, pendapat yang berkembang, serta dampak atau efek yang timbul (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Penelitian deskriptif kualitatif menyajikan data secara apa adanya tanpa adanya manipulasi atau perlakuan tertentu. Tujuan utama dari metode ini adalah memberikan gambaran yang menyeluruh tentang suatu peristiwa atau mengungkap serta menjelaskan fenomena yang terjadi (Khoiron, 2019). Proses penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan berbagai variabel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji (Khoiron, 2019).

Proses penelitian kualitatif ini berfokus pada upaya-upaya untuk memahami fenomena melalui pengumpulan informasi yang lebih bersifat naratif dan deskriptif (Creswell, 2009). Hal ini dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan yang bersifat terbuka, yang dapat menggali

pandangan dan pengalaman dari partisipan, serta mengumpulkan data menggunakan metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Creswell, 2009).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pembuatan kebijakan luar negeri Israel yang menentang operasional UNRWA sejak tahun 2023 hingga 2024. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori Level Analisis politik domestik dari Marijke Breuning yang melihat aktor domestik berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri (kelompok kepentingan, media dan opini publik).

3.3 Sumber Data

Data adalah sekumpulan fakta yang telah diproses oleh peneliti sehingga menjadi informasi yang memiliki makna. Dalam konteks penelitian, data berfungsi sebagai bahan dasar atau sumber utama untuk menjelaskan suatu fenomena (Zaim, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya melalui pihak ketiga atau dokumen (Sugiyono, 2014). Data ini dapat diperoleh dengan cara membaca, menganalisis, dan mempelajari literatur, buku, atau sumber lain yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2014).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang mencakup dokumen, laporan, artikel jurnal, berita, dan informasi terkait yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang kebijakan Israel terhadap UNRWA yang dapat diakses dari situs-situs resmi seperti United Nations (www.un.org), UNRWA (www.unrwa.org), Aljazeera (www.aljazeera.com), Israel's government services and information (www.gov.il), Times of Israel (www.timesofisrael.com), The National Interest (nationalinterest.org), CNN Worldwide (www.cnn.com), The New York Times (www.nytimes.com), dan IDN Times (idntimes.com).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, dilakukan studi literatur, di mana data dikumpulkan melalui kajian terhadap dokumen-dokumen hukum, laporan dari organisasi internasional, serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kebijakan, serta perspektif yang ada mengenai hubungan antara Israel dan UNRWA. Kedua, dilakukan analisis media, di mana data diperoleh dengan memeriksa laporan berita yang membahas kebijakan Israel terkait operasional UNRWA. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai dampak kebijakan tersebut dan bagaimana isu ini diberitakan dalam media, memberikan perspektif tambahan mengenai dinamika yang terjadi di lapangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang terstruktur untuk mencari dan mengorganisir transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi hal-hal penting yang perlu disampaikan sebagai temuan penelitian kepada pihak lain (Ulfatin, 2022). Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa tahapan, yaitu transkripsi hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data, dan triangulasi (Ulfatin, 2022). Melalui proses-proses ini, peneliti dapat mengolah dan menyaring data untuk menemukan pola atau tema yang relevan, yang pada akhirnya memungkinkan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. (Ulfatin, 2022)

Dalam penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi, mengategorikan, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Langkah pertama adalah identifikasi, di mana peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kebijakan dan upaya apa saja yang dilakukan PBB dan UNRWA, lalu faktor-faktor Israel menolak UNRWA. Selanjutnya, dilakukan kategorisasi, yaitu

mengelompokkan data berdasarkan seperti kelompok kepentingan, media dan opini publik. Kategorisasi ini penting untuk memahami alasan yang mendasari kebijakan Israel. Langkah terakhir adalah interpretasi, di mana data yang telah dikelompokkan akan dianalisis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap kebijakan Israel menolak UNRWA, dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh Israel merupakan cerminan dari upaya mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, aktor politik domestik mengambil peran penting.

Struktur pemerintahan Israel yang terdiri dari Presiden sebagai kepala negara simbolis, Perdana Menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Knesset sebagai lembaga legislatif, serta sistem peradilan yang independen, telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan pengaruh kelompok-kelompok politik sayap kanan yang mendominasi pemerintahan koalisi saat ini. Di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, kebijakan agresif terhadap Palestina, termasuk penolakan terhadap keberadaan UNRWA, mencerminkan ideologi nasionalis Yahudi yang kuat dan penolakan terhadap solusi damai. Penerapan undang-undang yang melarang operasi UNRWA di wilayah Israel, meskipun mendapatkan kecaman internasional, dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat posisi politik domestik Israel dengan mereduksi tekanan internasional dan menggugat legitimasi lembaga internasional yang dianggap menghalangi agenda nasionalis Israel, seperti ekspansi permukiman dan penghapusan status pengungsi Palestina.

Kebijakan luar negeri Israel terhadap UNRWA bukanlah sekadar respons terhadap dugaan ancaman eksternal, melainkan manifestasi dari dinamika politik domestik yang kompleks. Melalui tekanan kelompok sayap kanan, elite politik, institusi militer, serta opini publik yang dibentuk

oleh propaganda, Israel telah membingkai UNRWA sebagai ancaman strategis yang sah untuk disingkirkan. Serangkaian tindakan represif, mulai dari serangan militer hingga upaya legislasi yang mengkriminalisasi lembaga kemanusiaan tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan ini dipengaruhi kuat oleh kepentingan domestik dan narasi nasionalisme eksklusif. Dengan menggunakan teori politik domestik dalam analisis ini, terlihat jelas bahwa keputusan Israel terhadap UNRWA merupakan hasil kalkulasi politik internal yang bertujuan mempertahankan hegemoni, memperkuat kontrol atas wilayah sengketa, serta mengeliminasi simbol-simbol internasional yang dianggap menghambat proyek kolonisasi dan klaim teritorialnya.

Kebijakan luar negeri Israel terhadap UNRWA tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata elite politik atau pertimbangan keamanan semata, melainkan juga melalui peran strategis media dan opini publik domestik. Melalui narasi visual yang disusun secara sistematis seperti rekaman drone, klaim terowongan, dan tuduhan penggunaan fasilitas UNRWA oleh Hamas media berfungsi membentuk persepsi ancaman di kalangan masyarakat Israel, yang kemudian menekan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap lembaga tersebut. Narasi yang dibangun oleh media, diperkuat oleh retorika elite nasionalis seperti Wakil Walikota Aryeh King, telah mendorong mobilisasi opini publik hingga ke bentuk aksi langsung seperti demonstrasi dan serangan terhadap kantor UNRWA. Temuan ini sejalan dengan teori Breuning bahwa media tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga aktor aktif dalam memengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri, terutama dalam rezim demokratis yang sensitif terhadap persepsi publik. Maka, kebijakan Israel terhadap UNRWA merefleksikan bagaimana media dan opini publik dapat dikonstruksi untuk melegitimasi tindakan koersif dalam arena internasional.

Kritik Israel terhadap kurikulum UNRWA bukan semata-mata respons terhadap konten pendidikan, melainkan bagian dari strategi ideologis dan diplomatik yang lebih luas. Melalui media dan opini publik yang dibentuk oleh pernyataan elite politik seperti Duta Besar Gilad Erdan,

Israel berupaya mendeligitimasi UNRWA di mata internasional dengan membingkai badan tersebut sebagai institusi yang memfasilitasi hasutan dan ancaman terhadap identitas nasional Israel. Dalam konteks ini, media tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat produksi legitimasi yang memengaruhi opini publik domestik dan global, serta mendorong pembentukan kebijakan luar negeri. Penutupan sekolah-sekolah UNRWA dan upaya mengganti kurikulum Palestina dengan versi yang disahkan pemerintah Israel mencerminkan kepentingan ideologis yang ingin mempertahankan dominasi narasi Zionis dalam sistem pendidikan. Studi ini menegaskan bahwa media dan opini publik memainkan peran strategis dalam merumuskan kebijakan luar negeri, khususnya dalam konteks konflik berkepanjangan seperti antara Israel dan Palestina.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait:

1. Bagi komunitas internasional dan negara-negara donor, penting untuk memperkuat mekanisme pemantauan independen terhadap tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada lembaga kemanusiaan seperti UNRWA, guna memastikan bahwa kebijakan suatu negara tidak digunakan untuk melemahkan institusi internasional secara sepihak dan bermotif ideologis.
2. Untuk media internasional diharapkan dapat mengedepankan prinsip jurnalisme kritis dan independen dalam memberitakan isu-isu sensitif seperti ini, agar tidak menjadi corong narasi politik tertentu yang berpotensi memperkeruh konflik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas studi dengan pendekatan komparatif terhadap kebijakan luar negeri Israel dalam isu pendidikan di wilayah pendudukan, guna menggali lebih dalam hubungan antara ideologi, kekuasaan, dan narasi dalam konflik Israel–Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, N. (2024). *PBB: 9 Staf UNRWA Mungkin Terlibat dalam Serangan 7 Oktober*. <https://www.tempo.co/internasional/pbb-9-staf-unrwa-mungkin-terlibat-dalam-serangan-7-oktober-30200>
- Bajaj, M., Gota, J. C., & Tow, D. A. (2024). UNRWA and the Education of Palestinian Refugees : An Interview with Anne Irfan UNRWA and the Education of Palestinian Refugees : An Interview with Anne Irfan. *International Journal of Human Rights Education*, 8(1).
- Benny, M. (2009). *A History of the First Arab-Israeli War*. Yale University. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctt1np9bm>
- Berman, L. (2024). *Israel informs UN that 1967 agreement recognizing UNRWA is void*. <https://www.timesofisrael.com/israel-informs-un-that-1967-agreement-recognizing-unrwa-is-void/>
- Besheer, M. (2024). *Pimpinan UNRWA: Israel Kampanyekan Penghapusan Lembaga Bantuan untuk Palestina*. <https://www.voaindonesia.com/a/pimpinan-unrwa-israel-kampanyekan-penghapusan-lembaga-bantuan-untuk-palestina/7514102.html>
- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. Palgrave MacMillan.
- Chriswandito, A. A. C. (2024). *Peran United Nations Relief And Works Agency For Palestina Refugees In The Near East (Unrwa) Dalam Penanganan Pengungsi Palestina Di Era Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022*.
- CNN, I. (2024a). *Israel Sahkan UU yang Larang UNRWA Badan PBB untuk Pengungsi Palestina*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241029035744-120-1160615/israel-sahkan-uu-yang-larang-unrwa-badan-pbb-untuk-pengungsi-palestina>
- CNN, I. (2024b). *Kenapa Israel Sahkan UU Larang Badan PBB UNRWA?* <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241029085035-120-1160661/kenapa-israel-sahkan-uu-larang-badan-pbb-unrwa>
- Coplin, W. D. (1971). *Foreign policy decision-making*.

- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (berilustra). SAGE Publications.
- Dharmaputra, R., & Pabyantara, D. (2008). Analisis Politik Luar Negeri: Tinjauan Mikro ke Makro. In - https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf[http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities\(lsero\).pdf](http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities(lsero).pdf)<https://www.quora.com/What-is-the>
- Falkowski, L. S. (1979). *Psychological Models in International Politics*. Westview Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0008423900035812>
- Fitri, E. R., & Fadlia, F. (2019). Analisis Lobi Israel Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pada Konflik Israel Dan Palestina. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(1), 1–12.
- Hamdan, A. (2024). *Perang Israel Melawan UNRWA dan Dampaknya terhadap Pengungsi Palestina*. 7(1).
- Holsti, K. J. (1977). *International Politic*. Prentice-Hall.
- Khoiron, A. K. dan A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *LPSP (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo)*.
- Kuhuparuw, R., Fretes, C. H. J. De, Simanjuntak, T. R., Kristen, U., & Wacana, S. (2024). *Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Terhadap Refugees Palestina Di Yordania Pada Tahun 2018-2022*. 17(2), 541–552. [file:///C:/Users/Hype GLK/Downloads/23159-Article Text-83333-1-10-20240926 \(1\).pdf](file:///C:/Users/Hype%20GLK/Downloads/23159-Article%20Text-83333-1-10-20240926%20(1).pdf)
- Leader Maynard, J. (2019). Ideology and armed conflict. *Journal of Peace Research*, 56(5), 635–649. <https://doi.org/10.1177/0022343319826629>
- Morgenthau, H. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. McGraw-Hill.
- Mudore, S. B. (2024). *Arah Perdamaian Konflik Palestina-Israel Pascaserangan 7 Oktober 2023*. 7(2), 144–154.
- Patnistik, E. (2024). *Mengenal Sistem Pertahanan Iron Dome Israel*. Kompas.Com. <https://internasional.kompas.com/read/2024/04/12/103747770/mengenal->

sistem-pertahanan-iron-dome-israel

- Primayanti. (2024). *Pejabat PBB kritik Israel yang sebut serangannya upaya pembelaan diri*. <https://www.antaraneews.com/berita/4299267/pejabat-pbb-kritik-israel-yang-sebut-serangannya-upaya-pembelaan-diri>
- Rachmaniyah, A., Fuady, K., Syarief, L., Sulthon, M., & Kesuma, N. V. (2014). *Kebijakan Luar Negeri Myanmar*.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Simangunsong, N. (2024). *Studi Kasus Perang Israel -Hamis Tahun 2023 S.D Tahun 2024ditinjau Dari Aspek Strategi Dan Manfaatnya Bagi Tni Angkatan Laut*. 6(2), 20–46.
- Sitompul, A. S. (2014). *Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional*.
<https://media.neliti.com/media/publications/164494-ID-none.pdf>
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantatif, Kualitatif, dan R& D). *IKAPI*, 137.
- Sulaiman, M. (2022). Peran United Nations Relief And Works Agency For Palestine Refugees In The Near East (Unrwa) Dalam Penanganan Pengungsi Palestina Tahun 2016-2019. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71476%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71476/1/MUCHSIN SULAIMAN.FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71476%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71476/1/MUCHSIN%20SULAIMAN.FISIP.pdf)
- Titto, J. (2023). *Neoliberalisme Memandang UNRWA dalam Konflik Israel-Palestina Neoliberalisme Memandang UNRWA dalam Konflik Israel-Palestina*. June.
- Ulfatin, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- UNRWA. (1949). *General Assembly Resolution 302*.
<https://www.unrwa.org/content/general-assembly-resolution-302>
- UNRWA. (2022). *What We Do*. <https://www.unrwa.org/what-we-do>

UNRWA. (2023). *Where We Work*. Www.Unrwa.Org.

<https://www.unrwa.org/where-we-work>

Uzun, E. D. (2024). *PENGUNGSU PALESTINA DI GAZA : UNRWA DAN SEKITARNYA*.

Yilmaz, I., Studies, I., East, M., Morieson, N., Relations, I., Right, P. R., Secularism, C., & Europe, W. (2022). *Nasionalism, Religion, and Archaeologi: The Civilizational Populism of Benjamin Netanyahu and Likud*.

Zaim, M. (2014). *Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural*. FBS Universitas Negeri Padang.